

## ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Andri Apriyanti, S.E\* , Andre Kussuma Adiputra, SE, M.Si\* &  
Khaula Luthfiati R, SE, Akt, M.Ak, CA \*

\*Akuntansi, Universitas Respati Yogyakarta

Email: andre\_adiputra@respati.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to determine the financial performance of the Karanganyar Regency Government Budget Year 2015-2017 seen from: Analysis of Regional Income Variance, Analysis of Regional Income Growth, Decentralization Degree Ratio, Regional Finance Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Analysis of Regional Expenditure Variance, Analysis of Regional Expenditure Growth, Regional Expenditure Suitability Ratio, Regional Expenditure Efficiency Ratio, and Value For Money Concepts.*

*This research is a qualitative descriptive study. The technique of collecting data used in this study is documentation techniques. The data used is Secondary Data in the form of the Karanganyar Regency Government Budget Realization Report 2015-2017.*

*The results showed that the financial performance of the Karanganyar Regency Government was generally said to be good. This can be seen from: (1) Analysis of Regional Income Variance which shows the number 100.86% (2) Analysis of Regional Income Growth which shows a positive growth of 7.82% (3) Decentralization Degree Ratio which shows 16.50% (4) Regional Finance Dependency Ratio which shows 83.17% (5) Regional Financial Independence Ratio which shows the number 19.84% (6) Analysis of Regional Expenditure Variance below 100% on average (7) Analysis of Regional Expenditure Growth with an average 3.76% (8) Regional Expenditure Suitability Ratio The Karanganyar District Government allocates a large portion of its expenditure budget for operating expenditure, which averages 76.92%, while for capital expenditure 16.01% (9) Regional Expenditure Efficiency Ratio which shows the number 89.08% (10) Value For Money concept which shows that the realization of regional income exceeds the amount of the regional income budget. However, the degree of decentralization is still low and the level of financial dependence on the central government and regional government is still high.*

Keywords: *Financial Performance, Financial Ratio, Regional Budget, Value for Money*

### PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan kinerja finansial sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan digunakan untuk menilai kemampuan yang efisien, efektif, dan ekonomis pemerintah daerah dalam

melakukan pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2007:201).

### KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sujarweni (2015:1) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan

yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

### Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja sektor publik merupakan suatu sistem untuk menilai capaian suatu strategi dan berguna bagi manajer publik (Halim, 2012:128).

### Value for Money

Halim dan Kusufi (2012:132) menyatakan bahwa ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi dinilai menggunakan *value for money concept* dengan tujuan untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dan efektivitas sumber daya (Mardiasmo, 2018:175).

### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menampilkan informasi berupa ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan yang menampilkan data antara anggaran dan realisasi pada satu periode pelaporan (Ratmono dan Sholihin, 2015:18).

### Analisis Rasio Keuangan Daerah

Berikut ini rasio keuangan yang digunakan (Mahmudi, 2016):

#### 1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

#### 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Thn } t = \frac{\text{Pend. Thn } t - \text{Pend. Thn } (t - 1)}{\text{Pend. Thn } (t - 1)} \times 100\%$$

#### 3. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 1

### Kriteria Penilaian tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010

#### 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 2

### Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap TPD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gede Bisma dan Hery susanto, 2010

#### 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Transfer dari Provinsi atau Pusat}}$$

Tabel 3

### Kriteria Penilaian Kemandirian Daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan Transfer	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010

#### 6. Analisis Varians Belanja

$$\text{Analisis Varian} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

## 7. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\frac{\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1} \times 100\%$$

## 8. Analisis Keceragaman Belanja

- a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Operasi}}$$

- b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

## 9. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

$$\frac{\text{Rasio Efisiensi Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tabel 4

Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efisiensi Belanja

Kategori	Predikat
Efisien	<100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Abdul Halim 2008, (dalam Dini, Marheni dan Yenfi, 2017)

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015-2017.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka dan dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015-2017 kemudian direduksi, dirangkum, serta dipilih hal-hal yang pokok dan penting yang akan digunakan dan berkaitan dengan

penghitungan rasio keuangan untuk penilaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Karanganyar.

- b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data setelah direduksi dan dirangkum, kemudian data tersebut dihitung dengan menggunakan rasio keuangan.

- c. *Conclusion Drawing/ verification*

Di dalam penelitian ini setelah dilakukan penghitungan rasio keuangan maka langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan mengenai bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015-2017 berdasarkan penghitungan rasio keuangan. Setelah ditarik kesimpulan, maka selanjutnya mendeskripsikan bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan penghitungan rasio yang telah dilakukan

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Varians Pendapatan

Tabel 5

Dari ketiga tahun yang diteliti hanya pada tahun 2015 yang mengalami selisih yang disebabkan oleh pendapatan asli daerah, pendapatan hibah, serta bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah pusat yang masing-masing realisasinya melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Namun, pada tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Karanganyar mengalami selisih yang tidak diharapkan, hal ini terjadi disebabkan oleh realisasi dana alokasi khusus yang realisasinya lebih kecil dari jumlah yang telah dianggarkan. Jika dilihat secara keseluruhan Analisis Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2015-2017 dapat dikatakan baik dengan hasil 100,86%, dimana terjadi selisih yang diharapkan antara realisasi dan anggaran pendapatan sebesar Rp 37.211.728.605.

### Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 6

Dari Tabel 6 perhitungan di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015-2017 berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan daerah dinilai baik dengan

persentase pertumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan secara positif sebesar 19,43%.

### **Rasio Derajat Desentralisasi**

Tabel 7

Rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015-2017 masih kurang yang dilihat dari rata-rata rasio derajat desentralisasi tiga tahun keseluruhan yang hanya menunjukkan angka 16,41% yang menurut kriteria penilaian derajat desentralisasi bahwa kabupaten yang tingkat derajat desentralisasi berada pada skala interval 10,01-20,00 yang masih masuk kategori kurang. Kesimpulannya adalah bahwa kemampuan pendapatan asli daerah masih kurang dalam membiayai pembangunan dan pembiayaan daerah, kesadaran serta partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi terbilang rendah sehingga pendapatan asli daerah tidak banyak berkontribusi dalam pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.

### **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Tabel 8

Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada 2015-2017 sangat tinggi dengan angka 83,27%. Sehingga masuk dalam kategori kabupaten dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang berada pada skala interval >50,00 yang masih masuk kategori sangat tinggi. Kesimpulannya bahwa kinerja pendapatan asli daerah serta sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya bantuan transfer baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tabel 9

Berdasarkan Tabel 9 rasio kemandirian keuangan daerah di atas, kabupaten dengan tingkat kemandirian daerah yang berada pada skala interval 10,01-20,00 yang masih masuk kategori Kurang. Hal ini dikarenakan masih tingginya pendapatan transfer yang diterima

pemerintah daerah baik dari transfer pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

### **Analisis Varians Belanja Daerah**

Tabel 10

Selama tahun 2015-2017 realisasi belanja Kabupaten Karanganyar tidak ada yang melebihi dari jumlah belanja yang dianggarkan sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2015-2017 adalah Baik. Dimana tidak ada realisasi belanja yang melebihi jumlah yang dianggarkan pada tahun 2015-2017.

### **Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah**

Tabel 11

Dari tabel perhitungan di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015-2017 jika dilihat dari analisis pertumbuhan belanja daerah adalah baik dengan pertumbuhan secara positif sebesar 4,12%.

### **Rasio Keserasian Belanja**

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tabel 12

Selama tahun 2015-2017 sebagian dana alokasi dari belanja daerah lebih tinggi untuk belanja operasi. Rata-rata belanja operasi sebesar 77,45% dari total belanja daerah menunjukkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki pendapatan yang tinggi. Namun sebagian besar pendapatan yang diterima adalah pendapatan transfer dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 13

Diketahui bahwa porsi belanja modal lebih kecil daripada belanja operasi. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Kabupaten dengan perolehan pendapatan yang tinggi.

### **Rasio Efisiensi Belanja**

Tabel 14

Realisasi anggaran Kabupaten Karanganyar tahun 2015-2017 tidak terdapat jumlah yang melebihi dari belanja yang dianggarkan. Dari ketiga tahun yang diteliti tidak ada persentase rasio efisiensi belanja daerah yang melebihi angka 100%, sehingga disimpulkan bahwa daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015-2017 berada pada tingkat efisien belanja dan tidak terjadinya pemborosan dalam penganggaran bealanja pada ketiga tahun tersebut.

### **Konsep Value for Money**

#### **a. Ekonomi**

Kinerja Keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2017 dapat dikatakan ekonomis, dimana anggaran belanja daerah yang berjumlah Rp 6.280.531.271.480 lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja daerah yang hanya berjumlah Rp 5.594.558.654.212. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis.

#### **b. Efisiensi**

##### **Tabel 15**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2015-2017 dinilai efisien dimana rata rata rasio efisiensi yang menunjukkan angka 95,09% yang berarti bahwa setiap realisasi belanja daerah selalu dapat disesuaikan dengan realisasi pendapatan daerah.

#### **c. Efektifitas**

Berdasarkan perhitungan analisis varians pendapatan daerah (lihat tabel 4), Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2015-2017 dinilai efektif dengan rata-rata persentase realiasasi dan anggaran pendapatan daerah yang menunjukkan angka 100,86%, dimana realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5.889.904.751.990 jumlahnya lebih besar dari anggaran pendapatan daerah yang berjumlah Rp 5.852.693.023.385. Pemerintah dinilai berhasil bila bisa merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dan anggaran belanja lebih kecil dari target pendapatan dan target anggaran belanja yang diterima.

### **KESIMPULAN**

1. Hasil kinerja keuangan pendapatan daerah disimpulkan baik, meskipun derajat desentralisasinya cenderung rendah serta tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.
2. Hasil analisis kinerja keuangan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2015-2017 dapat dikatakan baik berdasarkan pertumbuhan belanja daerah yang positif serta tidak terjadinya pomborosan dana dalam penganggaran belanja.
3. Jika dilihat dari kinerja keuangan pendapatan daerah, belanja daerah, serta kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015-2017 adalah baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang jumlahnya melebihi dari jumlah yang dianggarkan serta pertumbuhan belanja daerah yang positif dan tidak terjadinya pemborosan dana dalam anggaran belanja. Meskipun tingkat derajat desentralisasinya masih rendah serta tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih tinggi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gde Bisma, I Dewa dan Susanto Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. *GeneC Swara* edisi khusus, Vol 04, No 03, Desember 2010.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

- Hendro Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui [keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/.../461/permendagri-nomor-37-tahun-2014](http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/.../461/permendagri-nomor-37-tahun-2014).
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>. Diakses 30 November 2018.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Melalui [www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367). Diakses 30 November 2018.

Tabel 5  
*Analisis Varians Pendapatan Daerah*

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Selisih	Persentase Realisasi APBD
2015	1.747.594.182.000	1.834.209.380.841	86.615.198.841	104,96%
2016	2.016.208.038.000	2.012.335.065.180	(3.872.972.820)	99,81%
2017	2.088.890.803.385	2.043.360.305.969	(45.530.497.416)	97,82%
<b>Rata-rata</b>	<b>1.950.897.674.462</b>	<b>1.963.301.583.997</b>	<b>12.403.909.535</b>	<b>100,86%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 6  
*Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2017*

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2015	1.173.094.090.643	1.293.457.616.361	20.363.525.718	10,26%
2016	1.293.457.616.361	2.012.335.065.180	718.877.448.819	55,58%
2017	2.012.335.065.180	2.043.460.305.969	31.125.240.789	1,55%
<b>Rata-rata</b>	<b>1.492.962.257.395</b>	<b>1.783.084.329.170</b>	<b>290.122.071.775</b>	<b>19,43%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 7  
*Rasio Derajat Desentralisasi*

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi
2015	255.445.549.750	1.834.209.380.841	13,93%
2016	301.307.800.956	2.012.335.065.180	14,97%
2017	415.142.563.370	2.043.460.305.969	20,32%
<b>Rata-rata</b>	<b>323.965.304.692</b>	<b>1.963.334.917.330</b>	<b>16,41%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 8

*Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah*

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2015	1.572.532.273.136	1.834.209.380.841	85,73%
2016	1.708.302.496.239	2.012.335.065.180	84,89%
2017	1.617.910.170.668	2.043.460.305.969	79,18%
<b>Rata-rata</b>	<b>1.632.914.980.014</b>	<b>1.963.334.917.330</b>	<b>83,27%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 9

*Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
2015	255.445.549.750	1.572.532.273.136	16,24%
2016	301.307.800.956	1.708.302.496.239	17,64%
2017	415.142.563.370	1.617.910.170.668	25,66%
<b>Rata-rata</b>	<b>323.965.304.692</b>	<b>1.632.914.980.014</b>	<b>19,85%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 10

*Analisis Varians Belanja Daerah*

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih	Persentase Realisasi APBD
2015	2.003.373.777.000	1.775.944.203.663	(227.429.573.337)	88,65%
2016	2.313.306.894.000	2.086.307.677.600	(226.999.216.400)	90,19%
2017	1.963.850.600.480	1.732.306.772.949	(231.543.827.531)	88,21%
<b>Rata-rata</b>	<b>2.093.510.423.827</b>	<b>1.864.852.884.737</b>	<b>(228.657.539.089)</b>	<b>89,01%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 11

*Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Daerah*

Tahun	Realisasi anggaran Tahun sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2015	1.543.887.294.095	1.648.835.279.623	104.947.985.528	6,80%
2016	1.648.835.279.623	1.818.357.207.631	169.521.928.008	10,28%
2017	1.818.357.207.631	1.732.306.772.949	(86.050.434.682)	-4,73%
<b>Rata-rata</b>	<b>1.670.359.927.116</b>	<b>1.733.166.420.068</b>	<b>62.806.492.951</b>	<b>4,12%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 12

*Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah*

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio BO terhadap TB
2015	1.407.209.478.292	1.775.944.203.663	79,24%
2016	1.436.088.621.711	2.086.307.677.600	68,83%
2017	1.460.079.328.298	1.732.306.772.949	84,29%
<b>Rata-rata</b>	<b>1.434.459.142.767</b>	<b>1.864.852.884.737</b>	<b>77,45%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 13

*Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja*

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio BM terhadap TB
2015	241.652.801.331	1.775.944.203.663	13,61%
2016	382.070.380.920	2.086.307.677.600	18,31%
2017	271.970.439.801	1.732.306.772.949	15,70%
<b>Rata-rata</b>	<b>298.564.540.684</b>	<b>1.864.852.884.737</b>	<b>15,87%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 14

*Rasio Efisiensi Belanja*

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2015	1.775.944.203.663	2.003.373.777.000	88,65%
2016	2.086.307.677.600	2.313.306.894.000	90,19%
2017	1.732.306.772.949	1.963.850.600.480	88,21%
<b>Rata-rata</b>	<b>1.864.852.884.737</b>	<b>2.093.510.423.827</b>	<b>89,01%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)

Tabel 15

*Rasio Efisiensi*

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2015	1.775.944.203.663	1.834.209.380.841	96,82%
2016	2.086.307.677.600	2.012.335.065.180	103,68%
2017	1.732.306.772.949	2.043.360.305.969	84,78%
<b>Rata-rata</b>	<b>1.864.852.884.737</b>	<b>1.963.301.583.997</b>	<b>95,09%</b>

Sumber: Data Diolah (2019)